

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal mendasar yang sangat di butuhkan oleh setiap orang. Untuk mewujudkan kesehatan masyarakat pemerintah berupaya menegakkan program pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kekuatan, untuk upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Bentuk realisasi yang dilakukan salah satunya adalah mengadakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu (Permenkes No. 3 Tahun 2023).

Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan adanya ketersediaan obat yang cukup, baik dalam jenis maupun jumlah yang diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan obat, maka sebelum penentuan kebutuhan obat harus dilakukan terlebih dahulu perencanaan logistik obat, efisiensi anggaran, untuk menjamin agar stok obat tidak berlebih atau kurang di penyelenggara pelayanan kesehatan. Pengadaan obat juga suatu aspek dimana permintaan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan obat agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan obat (Pratiwi, 2019).

World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa Indonesia telah dilibatkan dalam survei tentang harga obat, ketersediaan, perencanaan dan keterjangkauannya. di perkirakan ada sekitar 40% dana kesehatan yang dialokasikan di berbagai penyelenggara pelayanan kesehatan di Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan obat-obatan. Pendanaan Puskesmas berasal dari

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan lain sebagainya. Selain itu dana sah lainnya berasal dari badan penyelenggara jaminan kesehatan sosial (BPJS) kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang berasal dari APBD bersumber dari pendapatan asli daerah sebanyak 50% dan dana perimbangan. Sedangkan dana perimbangan mencakup dana alokasi khusus yang berasal dari APBN (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Perencanaan obat adalah salah satu tahap utama dalam manajemen perencanaan dan pengelolaan logistik obat untuk menentukan ketersediaan obat agar efektif dan efisien. Tingkat keberhasilan atau kegagalan pengelolaan obat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat. Sebagai contoh dalam merencanakan barang yang pengadaannya melebihi kapasitas atau kebutuhan. Jika kebutuhan item seharusnya 100 unit, namun direncanakan lebih dari itu maka akan terjadi pemborosan penganggaran, pembengkakan pada biaya pengadaan, penyimpanan, tidak adanya pendistribusian obat sehingga terjadi kerusakan atau kadaluarsa yang menumpuk di gudang penyimpanan obat, di unit pelayanan kesehatan khusus nya pusat kesehatan masyarakat (Permenkes No 5 tahun 2023).

Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disingkat dengan Puskesmas merupakan salah satu fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki prioritas dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan promotif dan preventif, menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta menjadikan masyarakat

yang mandiri dalam menjaga kesehatan individu dan keluarga masing-masing. Sebagai pusat kesehatan masyarakat tingkat kecamatan, Puskesmas memiliki tanggung jawab dalam pengadaan dan perencanaan obat yang dibutuhkan Puskesmas sebagai upaya pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu. Puskesmas diharuskan membuat perencanaan kebutuhan obat yang nantinya akan di usulkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Reski, et.al, 2016).

Perencanaan logistik obat di Puskesmas yang baik terdiri dari tahap pemilihan obat yang disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas berdasarkan pola konsumsi, pola penyakit, pemakaian obat terbanyak, pola kunjungan dan juga berdasarkan Lembar Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Selanjutnya dilakukan tahap kompilasi pemakaian obat yang dilihat dari kartu stok obat, kartu pemakaian obat harian, LPLPO, kertas resep, dan laporan obat. Pada tahap perhitungan kebutuhan obat dapat digunakan beberapa metode seperti metode konsumsi, metode morbiditas, ataupun metode proyeksi tingkat pelayanan. Pemilihan metode yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas (Permenkes No. 21 Tahun, 2020).

Metode yang digunakan harus melalui tahap proyeksi kebutuhan obat dapat dilakukan dengan penentuan rancangan stok akhir, anggaran, ataupun pengadaan obat tahun mendatang. Berdasarkan pedoman penyusunan rencana kebutuhan obat dan pengendalian persediaan obat di Puskesmas. Perencanaan kebutuhan obat yang baik akan terlaksana apabila dilakukan dengan berdasarkan metodologi dan analisa kebutuhan yang sesuai serta menggunakan data-data yang valid sehingga hasil dari perencanaan yang dilakukan dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan (Permenkes No. 21 Tahun, 2020).

Menurut penelitian Marissa Novi Rumondang (2015) tentang analisis perencanaan obat menunjukkan bahwa proses perencanaan obat belum sesuai dengan kebutuhan Puskesmas. Hal ini disebabkan oleh tenaga pengelola obat yang belum memahami tentang proses perencanaan obat sehingga dalam perencanaan kebutuhan obat tidak terlaksana dengan optimal. Selain itu, penentuan kebutuhan obat yang dilakukan tidak berdasarkan pada Fornas dan e-katalog. Masalah yang timbul ini merupakan salah satu akibat dari tidak adanya pelatihan yang diikuti oleh tenaga pengelola obat.

Penelitian terdahulu terkait perencanaan obat dilakukan oleh Gusti Fauzi di Puskesmas Salido Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 didapatkan hasil bahwa dalam perencanaan obat yang dilakukan masih terdapat data yang belum lengkap, diantaranya belum digunakan data populasi dan pertumbuhan penduduk dalam perencanaan obat. Selanjutnya diketahui bahwa obat yang tersedia belum memenuhi permintaan pasien. Selain itu, tenaga kesehatan di Puskesmas belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan perencanaan obat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulrieni dan Rozalina (2017) tentang Analisis Manajemen Logistik Obat di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang didapatkan hasil bahwa Puskesmas Lubuk Buaya mengalami permasalahan pada perencanaan dan pengadaan obat dikarenakan sistem E-katalog sehingga sering terjadi kekosongan obat, selain itu masalah ini juga disebabkan oleh prosedur kurang baik yang menyebabkan tidak adanya kejelasan dalam pembagian tugas.

Berdasarkan laporan dari Instalasi Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Padang dari 24 Puskesmas yang ada di Kota Padang, ada beberapa Puskesmas yang kinerja di bidang farmasi (logistik obat), sarana prasarana alat kesehatannya masih rendah, masih kurang nya SDM, yang seharusnya mendapatkan perhatian dan salah satunya Puskesmas Alai. Puskesmas Alai melakukan Perencanaan dan Pengadaan logistik obat di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Padang, di mana di Puskesmas ini masih ada masalah mengenai perencanaan obat, masih adanya kekosongan stok obat di Puskemas sehingga pasien harus membeli di luar. Selain itu di Puskesmas Alai belum ada tenaga apoteker.

Hasil survey awal di Puskesmas Alai yang dilakukan pada tanggal 2-4 Januari 2023 dengan melakukan wawancara kepada salah satu tenaga teknik kefarmasian didapatkan informasi bahwa manajemen logistik obat dilakukan bukan oleh apoteker melainkan oleh seorang tenaga teknik kefarmasian dikarenakan belum adanya tenaga apoteker di Puskesmas Alai. Penyimpanan obat dilakukan dengan cara menyediakan gudang obat sebagai sarana penyimpanan. Puskesmas melakukan pendistribusian obat ke apotek, sedangkan untuk permintaan obat dari Puskesmas Alai langsung ke Instalasi Faramasi Dinas Kesehatan Kota Padang, yang dilakukan satu kali dalam tiga bulan berdasarkan stok pemakaian obat yang sudah habis sertapencatatan dan pelaporan dibuat dalam kartu stok obat lalu disalin ke (LPLPO) untuk pelaporannya.

Dalam laporan dan pencatatan manajemen logistik obat di Puskesmas Alai terdapat beberapa jenis obat tertentu seperti obat diare, obat injeksi, dan obat batuk anak yang kurang penyediaannya sehingga tidak terelisasikan ke instalasi farmasi kesehatan (IFK) Kota Padang dikarenakan keterbatasan dana, selain itu juga masih ada pasien yang tidak mendapatkan obat-obat di Puskesmas dan terpaksa harus membeli diluar dikarenakan permintaan yang terlalu banyak sedangkan stok obat tidak mencukupi akan permintaan tersebut. Wawancara juga dilakukan kepada asisten tenaga teknik kefarmasian, menurut informasi yang didapatkan masih ada masalah pada pelayanan penyimpanan obat, yang seperti masih terjadi kekurangan rak untuk penyusunan obat. Penyimpanan obat di Puskesmas Alai masih belum memenuhi kriteria sesuai dengan aturan Permenkes RI No 26 Tahun 2020.

Sesuai dengan aturan Permenkes RI No 26 Tahun 2020. Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yaitu penyelenggaraan pelayanan kefarmasian harus dipimpin oleh seorang tenaga Apoteker dan didampingi oleh Tenaga Teknis Kefarmasian, untuk gudang dan kamar obat mempunyai parameter yang dipersyaratkan antara lain memiliki luas minimal 3x4 m, adanya ventilasi, adanya cahaya yang cukup, lantai terbuat dari semen, dinding dibuat licin, mempunyai pintu yang dilengkapi kunci ganda khusus narkotik dan psikotropika yang terkunci. namun di Puskesmas Alai masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Analisis Manajemen Logistik Obat di Puskesmas Alai Kota Padang tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Manajemen Logistik Obat di Puskesmas Alai Tahun 2023?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Manajemen Logistik Obat di Puskesmas Alai pada tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui *input* perencanaan logistik obat, sehingga dapat terencanaanya manajemen logistik obat di Puskesmas Alai Kota Padang tahun 2023.
- b. Diketahui proses (Perencanaan, Pengadaan, Penyimpanan, Pendistribusian, Pencatatan dan Pelaporan) manajemen logistik obat di Puskesmas Alai Kota Padang tahun 2023.
- c. Diketahui *output* (Terlaksananya Manajemen Logistik Obat di Puskesmas Alai) Kota Padang tahun 2023

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bentuk pengaplikasian pengetahuan yang didapat selama kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber, penunjang, ataupun referensi penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Analisis Perencanaan Manajemen logistik obat di Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 2023.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

Sebagai bahan bacaan dan sumber referensi bagi peneliti berikutnya.

b. Bagi Puskesmas Alai

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, Puskesmas Alai dapat menjadikan sebagai salah satu pedoman evaluasi pelayanan kesehatan lebih terkhususnya kepada perencanaan logistik obat di Puskesmas Alai Kota Padang.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas tentang Analisis Manajemen Logistik Obat di Puskesmas Alai Kota Padang pada tahun 2023. Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 24 Mei - 21 Juni tahun 2023. Teknik penentuan informan yaitu dengan *Purposive Sampling* yang melibatkan sebanyak 5 informan yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Tenaga Teknik Kefarmasian dan 2 orang Asisten Apoteker. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dari hasil wawancara terstruktur dan observasi membandingkan hasil wawancara dengan hasil yang tampak nyata, data sekunder di dapatkan dari laporan Puskesmas Alai. Sedangkan analisis data dilakukan menggunakan metode *Trianggulasi* sumber.